



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
UNIT KERJA : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : M. DARWIN
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 180967

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	3.140.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 561 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 148 m2/100 m2 di KAB / KOTA SIDENRENG RAPPANG, Rp. 500.000.000		
4. Tanah Seluas 520 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 133 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	153.000.000
1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000		
2. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000		
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	143.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	44.600.000

**F. HARTA LAINNYA****Sub Total**

Rp. ----

Rp. 3.480.600.000

III. HUTANG

Rp. 300.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.180.600.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpн.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpн.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila di kemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.